



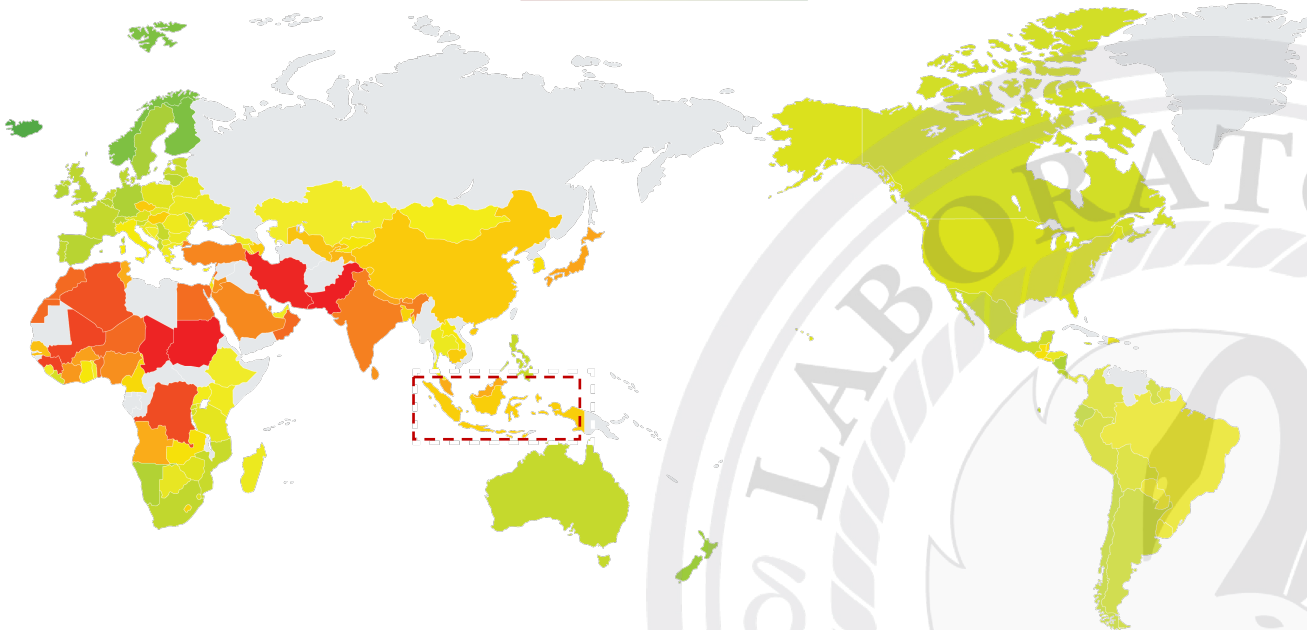
*Webinar* LAB 45  
Memperingati Hari Perempuan Internasional

**Menakar Keberpihakan  
Pemerintah terhadap  
Perempuan:  
*Komitmen Etik atau  
Gimik Politik?***

6 Maret 2025

# Global Gender Gap Index

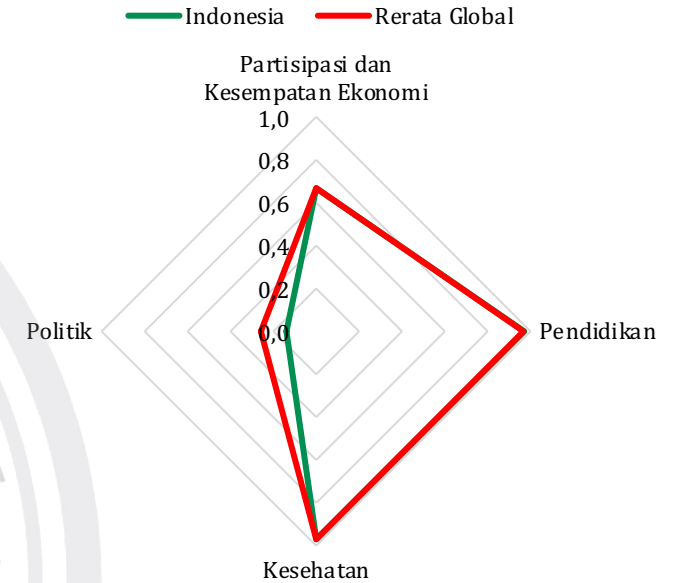
0,568  0,935



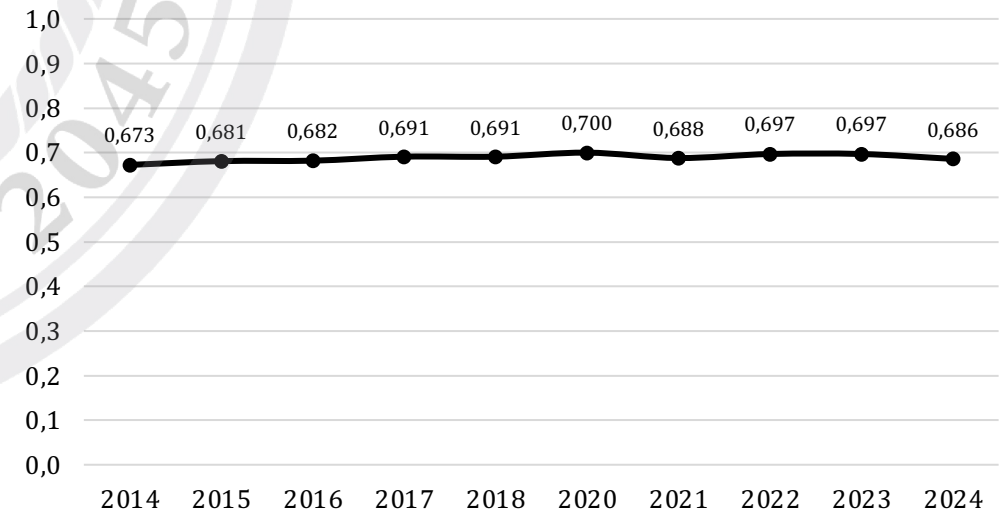
Skor Indonesia **0,686**      Rerata Global **0,716**      Peringkat Indonesia **100**      Negara Diukur **146**

**Global Gender Gap Index** mengukur paritas gender dalam **empat** dimensi; **ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik**. **World Economic Forum (WEF)** menilai skor Indonesia masih berada di bawah rerata global. Dalam satu dekade terakhir, skor Indonesia cenderung **stagnan**. Indonesia justru mengalami penurunan skor menjadi 0,686, sehingga posisinya turun ke peringkat 100 dari tahun sebelumnya peringkat 87. Di tingkat kawasan, Indonesia berada di bawah Filipina (25), Singapura (48), Thailand (65), Vietnam (72), dan Laos (89). Indonesia paling **lemah** dalam variabel **Pemberdayaan Politik**. Representasi perempuan yang menduduki kursi **parlemen** belum memenuhi amanat Undang-undang terkait keterwakilan perempuan sebesar 30%. Proporsi menteri perempuan juga masih stagnan di angka 26.1%.

## Posisi Indonesia 2024

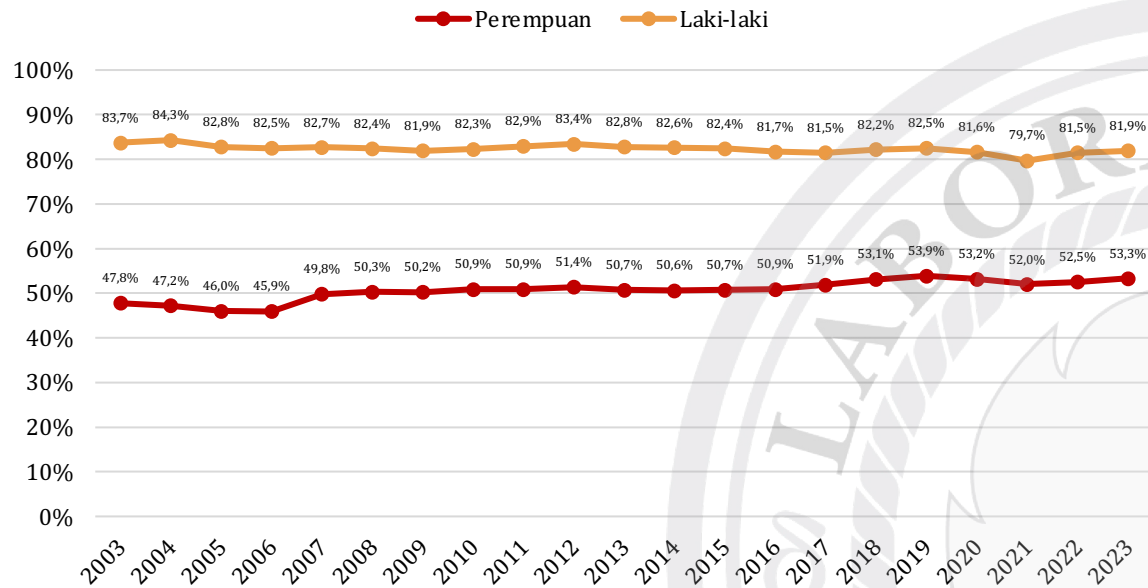


## Tren Skor Indonesia 2014-2024

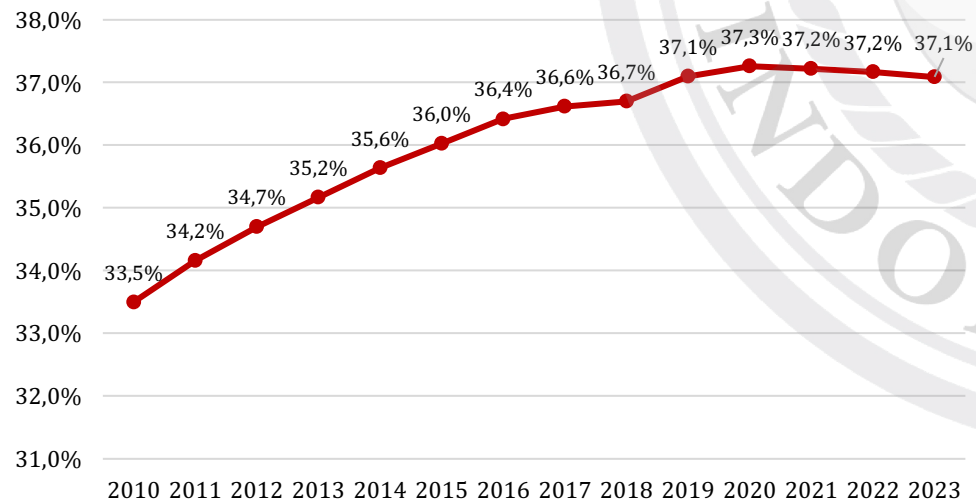


# Perempuan dan Ekonomi (1)

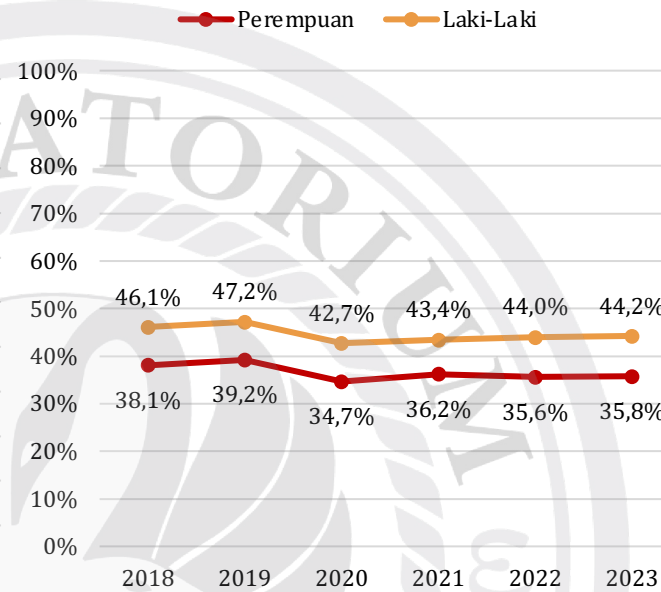
## Labor Force Participation Rate



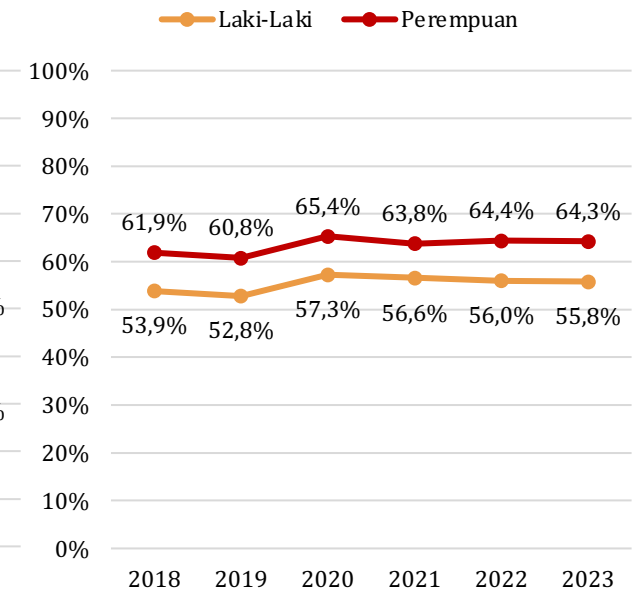
## Sumbangan Pendapatan Perempuan



## Proporsi Pekerja Formal



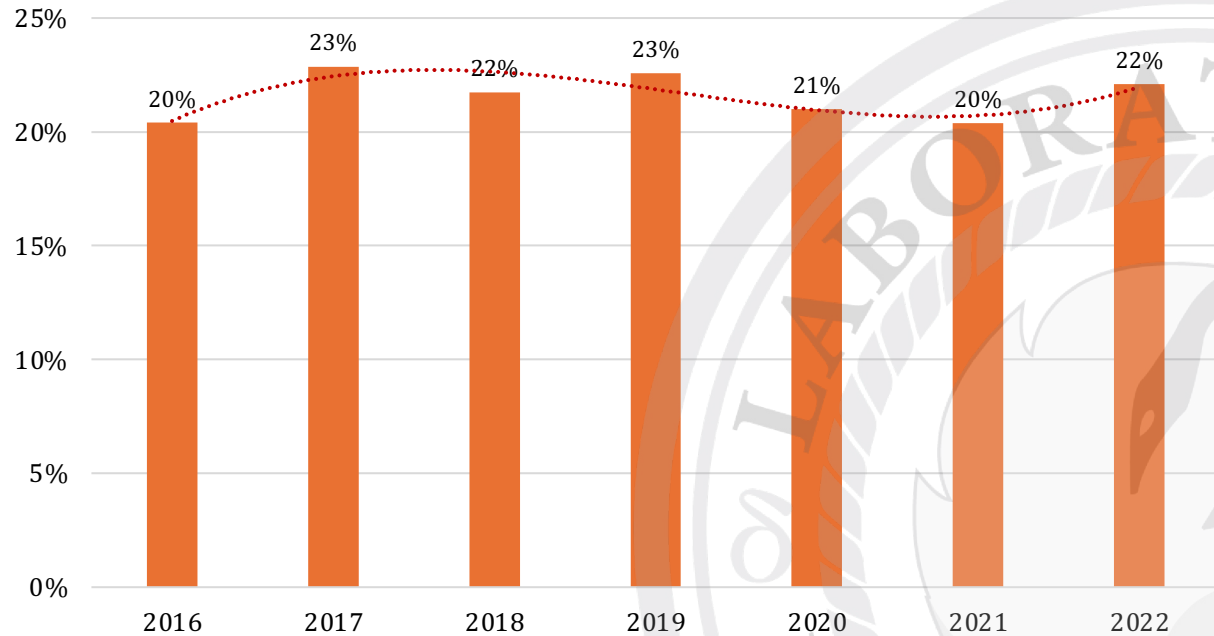
## Proporsi Pekerja Informal



Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** laki-laki mencapai 82%, jauh lebih tinggi dibandingkan TPak perempuan yang hanya mencapai 53%. Meskipun begitu, partisipasi perempuan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama dua dekade terakhir. Jika dilihat dari proporsi jenis pekerjaan, tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap di sektor informal, sementara persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal masih lebih banyak dari Angkatan Kerja perempuan. Data ini tentunya bukan menjadi temuan yang baik. Sejalan dengan kondisi pekerja informal yang sarat akan minimnya perlindungan kerja dan standar upah yang tidak menentu, sehingga menyebabkan kelompok perempuan menjadi lebih rentan terhadap disrupsi ekonomi yang berlangsung.

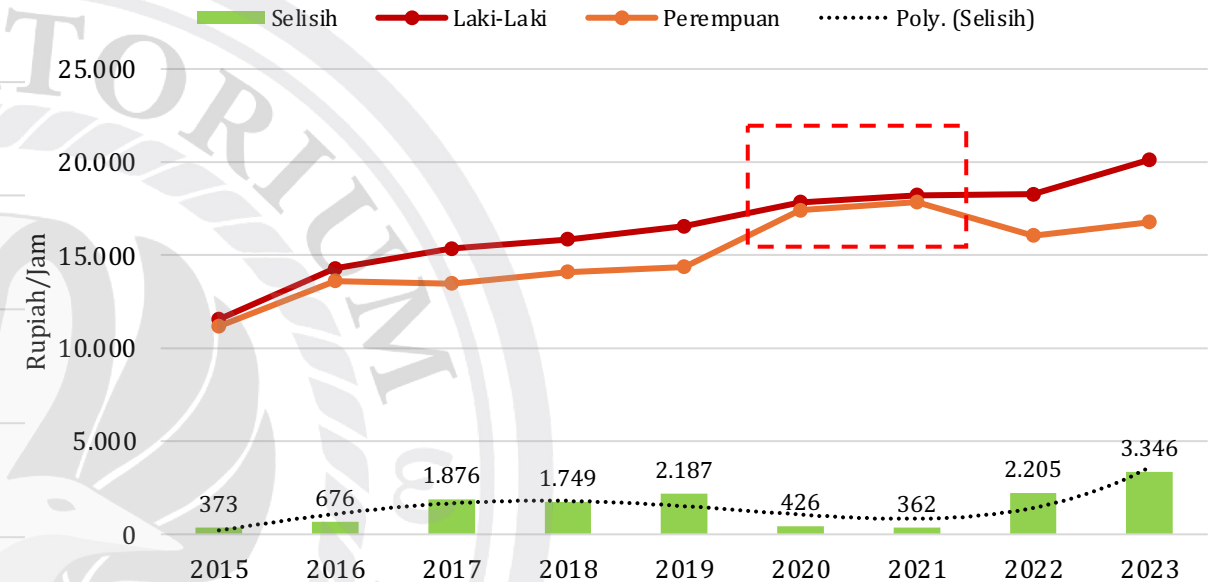
# Perempuan dan Ekonomi (2)

## Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan



Sumber: Diolah oleh CNBC dan UN Women dari BPS (2022)

## Upah Rata-Rata Jam Pekerja Menurut Jenis Kelamin

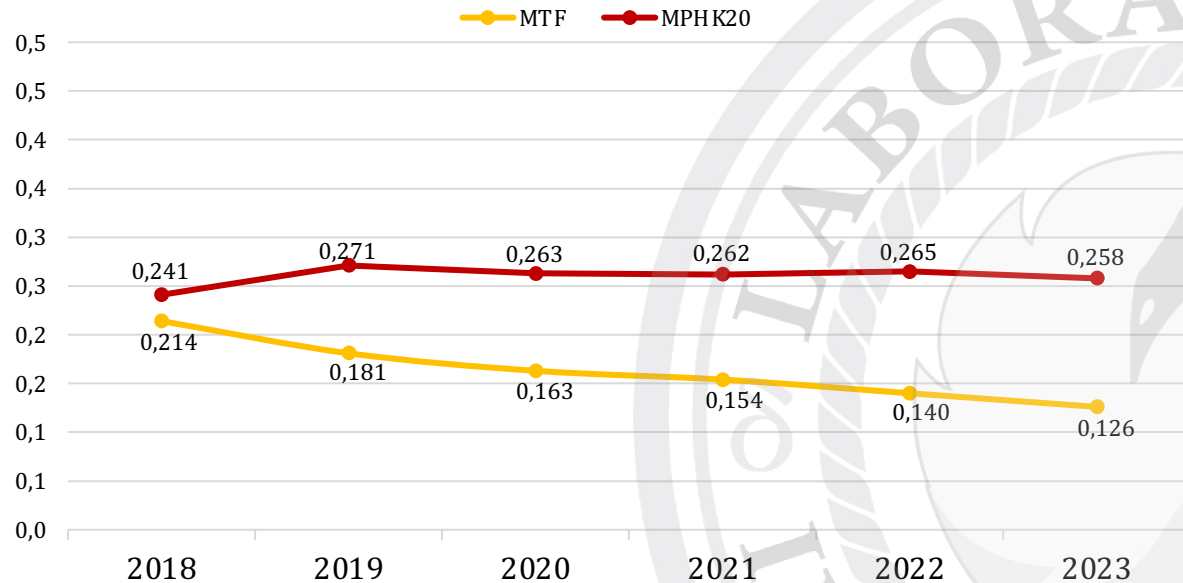


Sumber: Diolah oleh LAB 45 dari BPS (2023)

Ketimpangan gender dalam dimensi pasar tenaga kerja di Indonesia turut terefleksi melalui **kesenjangan upah** antara laki-laki dan perempuan. Pantauan data persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan sejak tahun 2016 menunjukkan **stagnasi pada level 20%**. Sementara itu, tinjauan lebih jauh menunjukkan bahwa **selisih antara upah rata-rata jam** pekerja laki-laki dan perempuan kembali mengalami **pelebaran** pada tahun **2022 dan 2023** hingga mencapai angka Rp3.346/jam. Padahal nilai tersebut sempat mengalami perbaikan ke level Rp362/jam pada tahun 2021.

# Perempuan dan Kesehatan (1)

## Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi 2018–2023



Sumber: Diolah oleh LAB 45 dari BPS (2023)

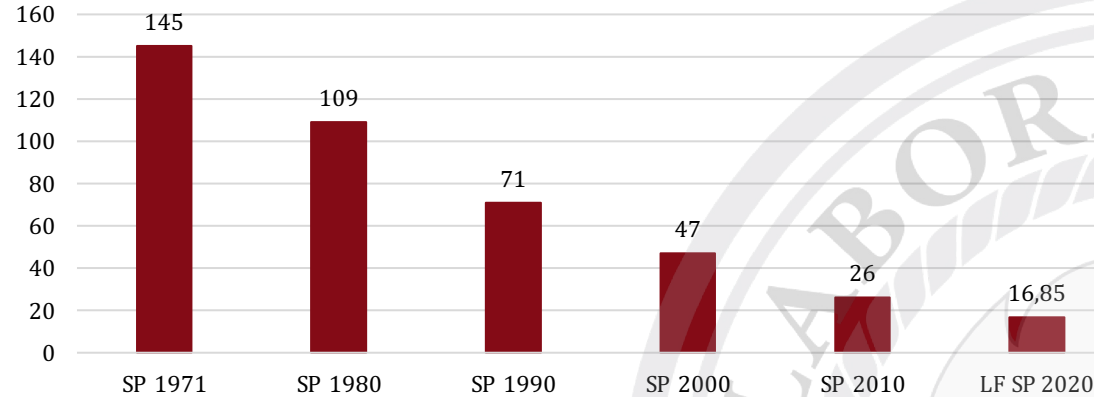
Proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF) terus menurun sejak 2018, sementara itu, angka perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MPHK20) cenderung stabil dan hanya sedikit menurun. Ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke fasilitas kesehatan membaik, kehamilan remaja masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kehamilan di usia muda sering kali diiringi dengan keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan ekonomi yang belum stabil. Ini bisa menghambat dampak positif dari peningkatan akses kesehatan.

### Keterangan:

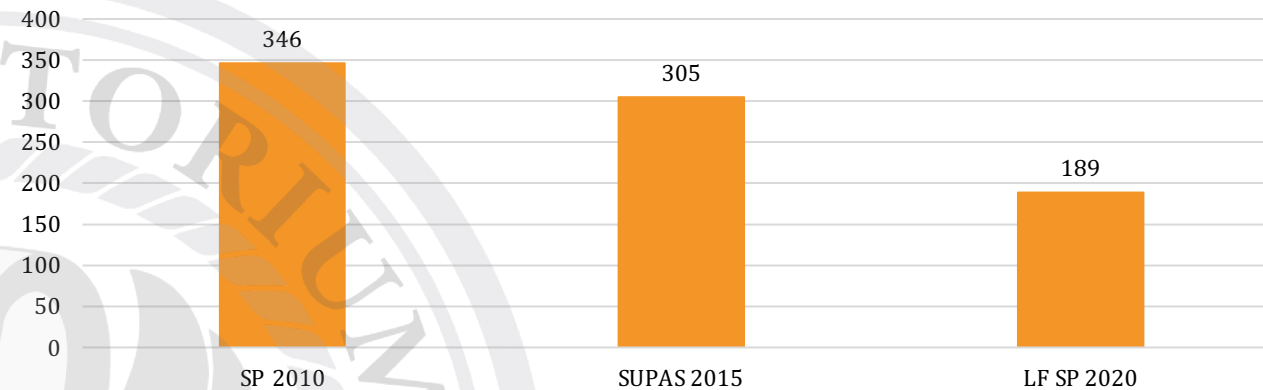
- MTF = Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di Fasilitas Kesehatan
- MPH20 = Proporsi perempuan Indonesia berusia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun

# Perempuan dan Kesehatan (2)

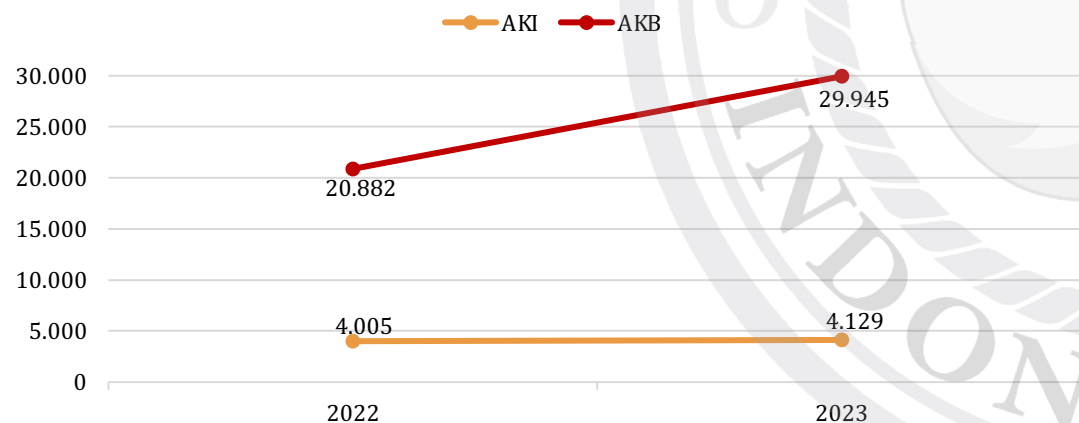
Rasio AKB per 1.000 Kelahiran Hidup  
1970–2020



Rasio AKI per 100.000 Kelahiran Hidup  
1970–2020



Jumlah Kematian Ibu dan Bayi 2022–2023



## Keterangan

- AKI = Angka Kematian Ibu
- AKB = Angka Kematian Bayi
- LF SP = Long Form Sensus Penduduk

Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) konsisten menurun berdasarkan data dari Sensus Penduduk per 10 tahun, begitu juga dengan rasio Angka Kematian Ibu (AKI). Berbeda dengan tren penurunan jangka panjang yang ditunjukkan oleh Sensus Penduduk, data MPDN menunjukkan adanya peningkatan jumlah kematian ibu dan bayi pada tahun 2022 hingga 2023, dengan kematian bayi naik dari 20.882 menjadi 29.945 dan kematian ibu dari 4.005 menjadi 4.129. Penyebab utama kematian ibu pada periode ini adalah eklampsia, yang berkontribusi sebesar 23% pada 2022 dan meningkat menjadi 24% pada 2023, serta perdarahan, yang menyumbang 20% pada 2022 dan naik menjadi 23% pada 2023. Sementara itu, kematian bayi banyak disebabkan oleh bayi berat lahir rendah (BBLR) atau prematur dan asfiksia. Sosialisasi kesehatan, terutama sejak awal kehamilan, menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian ibu karena penyebab utama tersebut masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi lebih lanjut.



## Visi Misi Pemerintahan Prabowo

### Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan **Hak Asasi Manusia (HAM)** (Asta Cita 1)
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, **kesetaraan gender**, serta **penguatan peran perempuan**, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4)
- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil (Hasil Terbaik Cepat 1)
  - Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas (Program Prioritas 10)

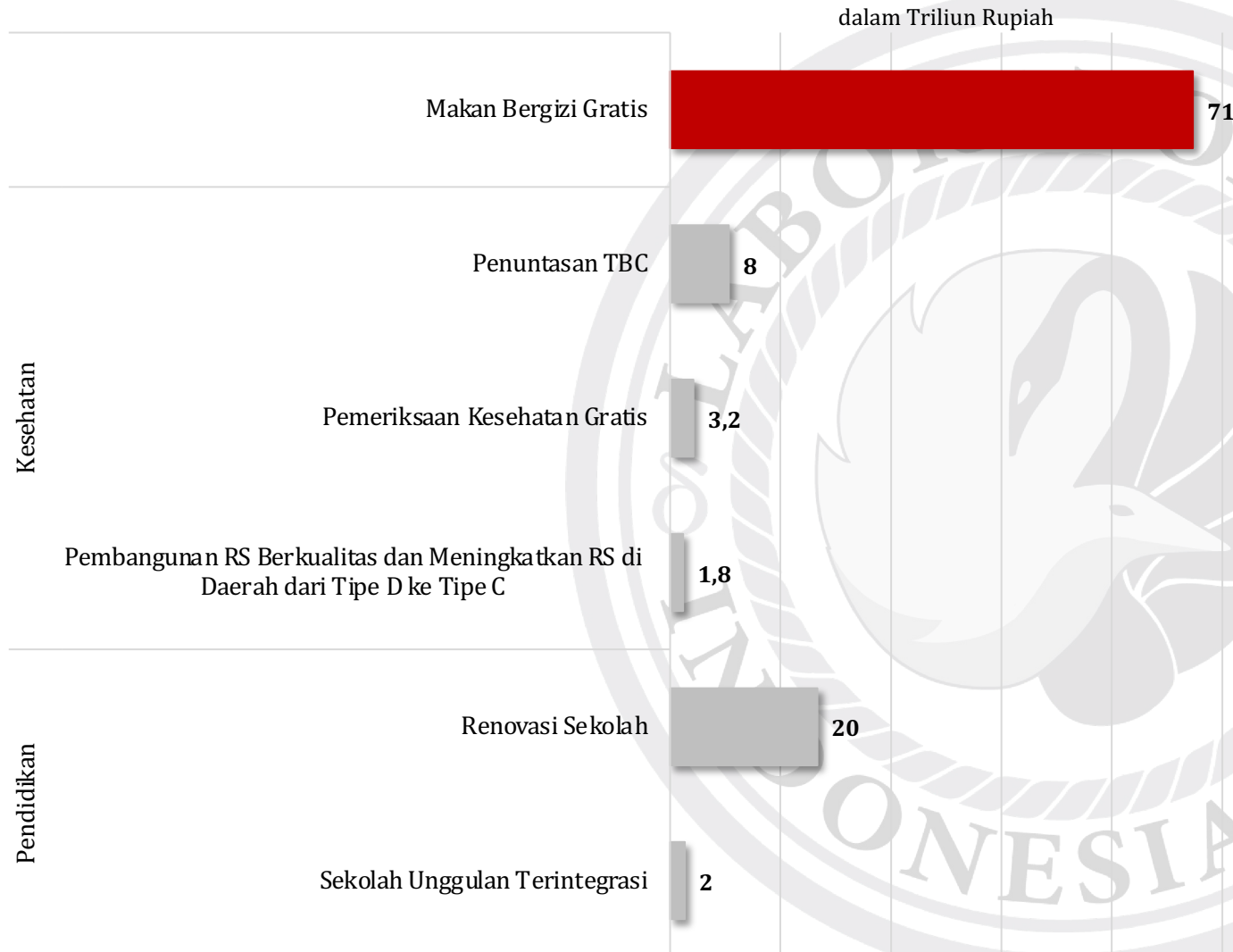
### Pendidikan

- Memperkuat pembangunan **sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga**, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4)
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi (Hasil Terbaik Cepat 4)
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (Hasil Terbaik Cepat 5)
- Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi (Program Prioritas 8)

### Kesehatan

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, **kesehatan**, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4)
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan **narkoba** (Asta Cita 7)
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten (Hasil Terbaik Cepat 2)
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (Hasil Terbaik Cepat 5)
- Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat (Program Prioritas 7)

# Anggaran Program Unggulan Prabowo di 100 Hari Pemerintahan

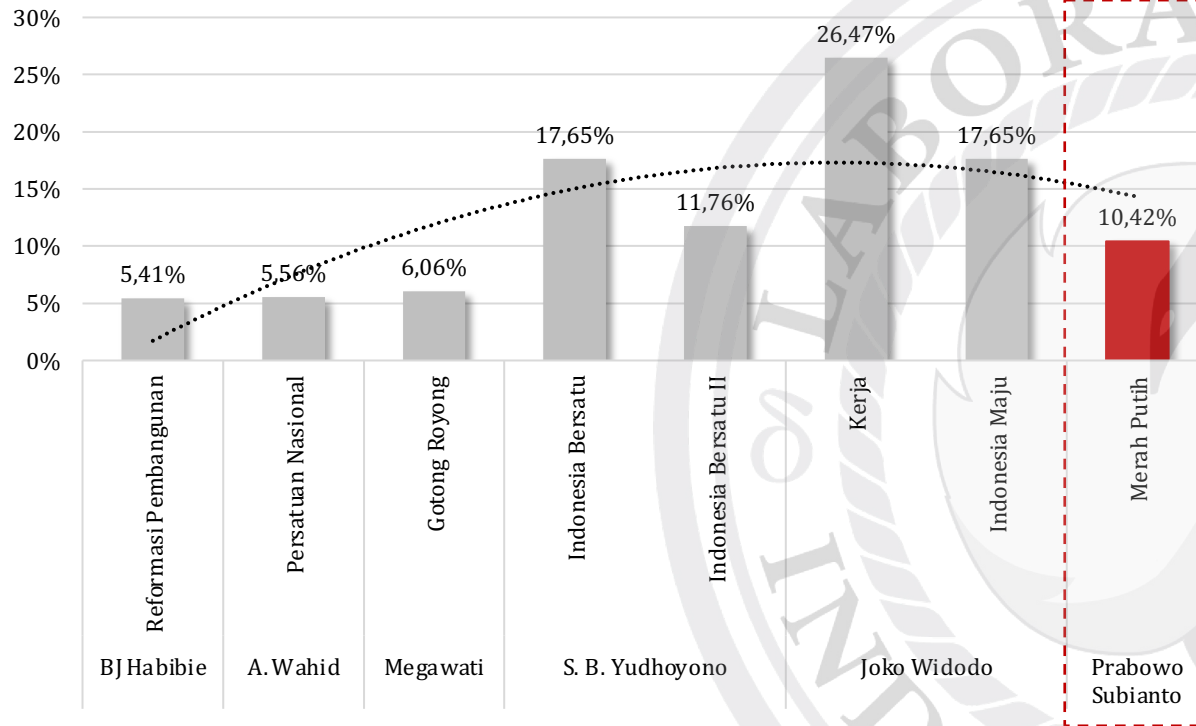


Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, anggaran besar dialokasikan untuk program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 T. **Program ini kemudian mendapatkan persetujuan untuk menambah anggaran sebesar Rp100 T.** Selain itu, dana dialokasikan untuk Perumahan Terjangkau (Rp130 T) serta berbagai inisiatif kesehatan, seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 T), Peningkatan Rumah Sakit (Rp1,8 T), dan Pemberantasan Tuberkulosis (Rp8 T).

Berbeda dengan fokus besar pada ketahanan pangan dan infrastruktur sosial, sejauh ini **tidak ada program prioritas khusus untuk perempuan** (kecuali program MBG ibu hamil yang pelaksanaannya masih belum merata). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan.

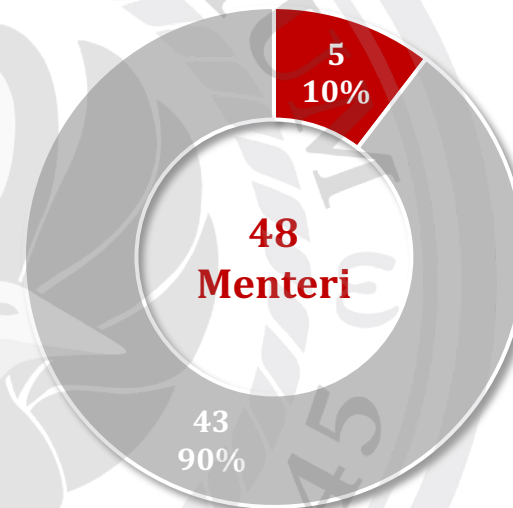
# Kementerian Pemerintahan Prabowo

**Proporsi Menteri Perempuan di Setiap Kabinet Pasca Reformasi**



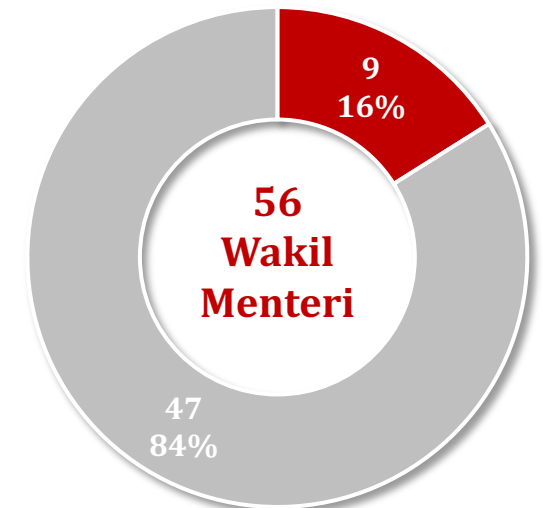
**Menteri Kabinet Merah Putih**

■ Perempuan ■ Laki-laki



**Wakil Menteri Kabinet Merah Putih**

■ Perempuan ■ Laki-laki



Representasi perempuan dalam Kabinet Prabowo masih sangat minim. Hanya 10% dari total menteri dan 16% dari wakil menteri adalah perempuan. Tidak ada perempuan yang menduduki posisi Menteri Koordinator, mempertegas ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan strategis. Kementerian yang berdampak luas terhadap kesejahteraan perempuan, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, sosial maupun kementerian strategis lain seperti urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan juga luput dari kepemimpinan perempuan. Keterwakilan perempuan di Kementerian pendidikan dan Kemendagri hanya diwakili pada tingkat wakil menteri, yakni Stella Christie di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Ribka Haluk di Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Menteri PPPA tetap diisi perempuan, namun lebih sebagai simbol kontinuitas daripada tanda perubahan struktural.

# Afiliasi Menteri dan Wakil Menteri Perempuan Kabinet Merah Putih

No.	Menteri	Afiliasi Partai	Latar Belakang
1.	<b>Sri Mulyani Indrawati</b> Menteri Keuangan	Non-Partai	Menteri Keuangan 2014-2024
2.	<b>Meutya Viada Hafid</b> Menteri Komunikasi dan Digital	Golkar	Jurnalis/Anggota Komisi I DPR
3.	<b>Rini Widyantini</b> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Non-Partai	Sekretaris Kementerian PAN-RB
4.	<b>Widiyanti Putri Wardhana</b> Menteri Pariwisata	Non-Partai	Pebisnis (Teladan Group)
5.	<b>Arifatul Choiri Fauzi</b> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	Non-Partai	Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Periode 2025-2030.

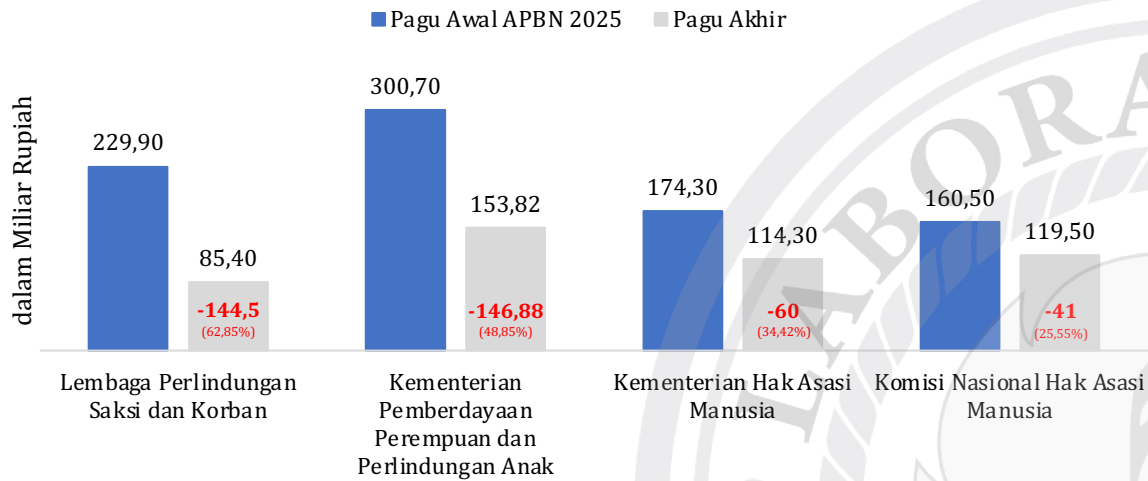
Berdasarkan latar belakang yang ada, menteri perempuan pemerintahan Prabowo cukup banyak berasal dari kalangan non-partai/profesional yang beragam. Partai Golkar menjadi partai yang cukup banyak mendapatkan kursi Menteri/Wakil Menteri perempuan di Kabinet Pemerintahan Prabowo. Komposisi ini mencerminkan preferensi terhadap teknokrasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebijakan yang kurang inklusif dan lebih berpihak pada kelompok tertentu.

No.	Wakil Menteri	Afiliasi Partai	Latar Belakang
1.	<b>Ribka Haluk</b> Wakil Menteri Dalam Negeri	Non-Partai	Pj. Gubernur Papua Tengah (2022-2024)
2.	<b>Stella Christie</b> Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Non-Partai	Guru besar di Tsinghua University
3.	<b>Christina Aryani</b> Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI	Golkar	Anggota Komisi I DPR
4.	<b>Dyah Roro Esti</b> Wakil Menteri Perdagangan	Golkar	Anggota Komisi VII DPR
5.	<b>Diana Kusumastuti</b> Wakil Menteri Pekerjaan Umum	Non-Partai	Direktur Jenderal Cipta Karya/ Komisaris PT Brantas Abipraya.
6.	<b>Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka</b> Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN	PSI	Anggota Dewan Pembina PSI
7.	<b>Ni Luh Puspa</b> Wakil Menteri Pariwisata	Non-Partai	Jurnalis KompasTV
8.	<b>Irene Umar</b> Wakil Menteri Ekonomi Kreatif	Non-Partai	CEO dan Pendiri W3GG
9.	<b>Veronica Tan</b> Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non-Partai	Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta

Sumber: diolah oleh LAB45 dari berbagai sumber

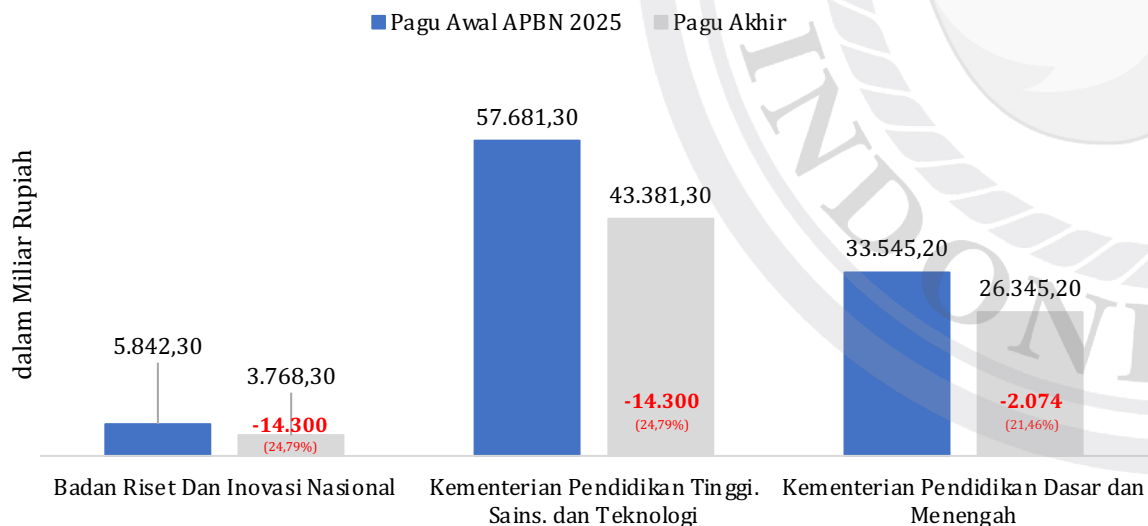
# Pemangkasan Anggaran di K/L terkait Perempuan, Kesehatan, dan Pendidikan

## K/L terkait Perempuan

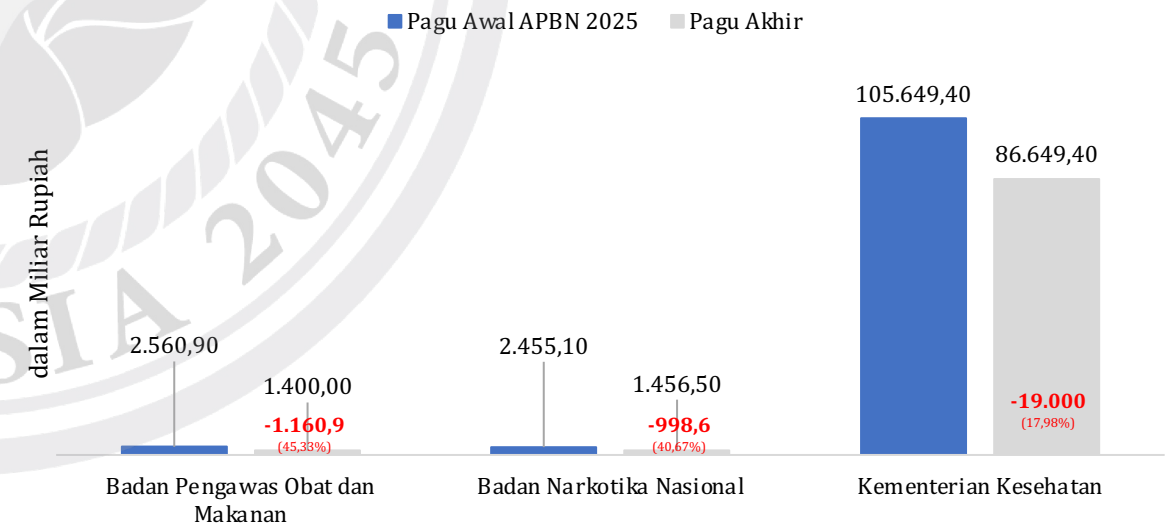


Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamankan efisiensi belanja di seluruh K/L, termasuk sektor pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pendidikan, dan kesehatan yang juga mendapatkan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Pada **K/L terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan**, LPSK kehilangan 62,85% anggarannya, berisiko melemahkan perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, anggaran KemenPPPA turun 48,85% menjadi Rp153,7 miliar, dengan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendanaan. **Di sektor pendidikan**, Kemendikdasmen mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp7,2 triliun, sedangkan KemdiktiSaintek mengalami pemotongan terbesar di antara K/L lainnya di sektor pendidikan. Besaran efisiensi sebesar 24,8% memicu kekhawatiran mahasiswa terhadap kenaikan beban biaya kuliah, mengingat pos belanja 'Bantuan lembaga pendidikan yang disalurkan kepada PTN/PTS' mengalami penurunan 50% hingga 60%. **Di sektor kesehatan**, pemotongan hampir Rp19 triliun di Kementerian Kesehatan ditakutkan dapat menghambat layanan esensial dan pengawasan obat.

## K/L terkait Pendidikan

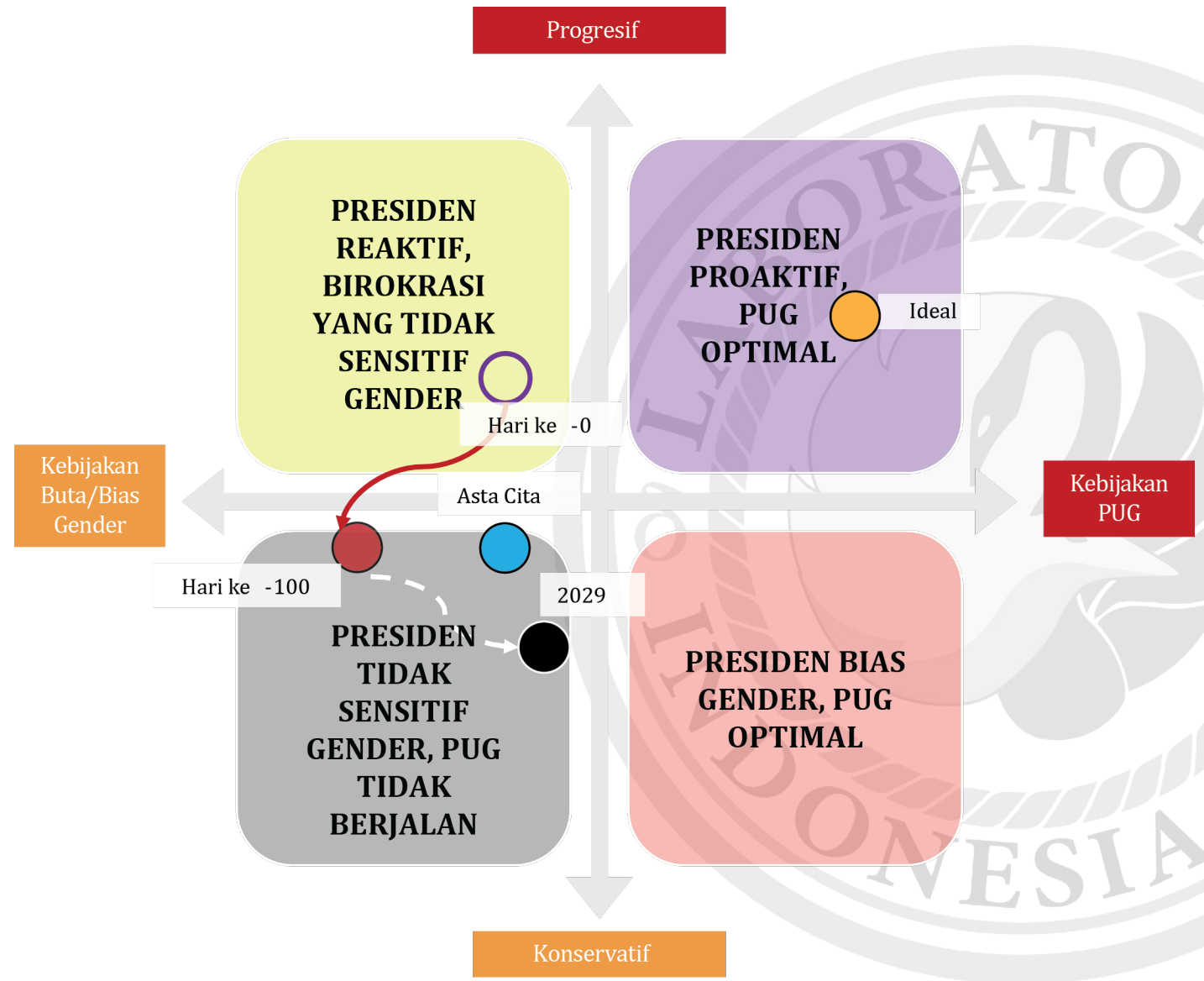


## K/L terkait Kesehatan



Sumber: Nota Keuangan APBN 2025; RDP DPR RI (2025)

# Dinamika dan Proyeksi Arah Kebijakan PUG



**Hari ke-0** diukur melalui kebijakan pemerintahan sebelumnya dan kebijakan terkait gender yang dibawa oleh presiden melalui Asta Cita. Titik ini menunjukkan bahwa presiden sebelumnya telah menunjukkan responsivitas terhadap isu gender, tetapi birokrasi yang masih kurang sensitif sehingga pelaksanaan kebijakan berbasis gender kurang maksimal. Pada **hari ke-100**, kebijakan PUG tampak melemah, ditandai dengan berkurangnya alokasi anggaran dan minimnya representasi Perempuan di Kementerian strategis, hal ini mendorong pemerintahan ke arah stagnasi dalam isu gender. **Proyeksi 2029** mengarah pada dua kemungkinan: perbaikan sesuai program dalam Asta Cita, jika reformasi birokrasi dilakukan, atau stagnasi jika tren saat ini berlanjut tanpa perubahan signifikan.

# Rekomendasi

## Meningkatkan Sistem Pendukung bagi Perempuan dalam Kebijakan Publik

- Program sosial dan Pembangunan terkait perempuan harus didukung pemerintah dan masyarakat, bukan hanya perempuan.
- Kebijakan perempuan harus melibatkan laki-laki, terutama dalam isu kekerasan dan ketahanan keluarga.
- Menaikkan status Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional menjadi Keputusan Presiden.

01

## Mewujudkan Keberlanjutan Kebijakan yang Berorientasi pada Dampak Jangka Panjang

- Mempertahankan dan mengembangkan program-program perlindungan/pemberdayaan perempuan yang terbukti efektif.
- Pelibatan aktif masyarakat sipil dalam evaluasi efektivitas suatu kebijakan/program.
- Dibutuhkan *special envoy* untuk mengorkestrasi dan mengevaluasi implementasi PUG di K/L atau di tingkat daerah.

02

04

## Mendorong Demokrasi yang Lebih Inklusif dan Responsif Gender

- Penerapan demokrasi feminis yang inklusif.
- Memperkuat regulasi keterwakilan perempuan untuk meningkatkan keefektifan kuota 30%.

03

## Mengintegrasikan Perspektif Gender dalam Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan

- Analisa gender yang jelas pada setiap kebijakan/program pemerintah.
- Pentingnya data terpilah gender pada survei kepuasan masyarakat dan evaluasi kebijakan pemerintah.



**TERIMA KASIH**